RESUME MATA KULIAH HUKUM TATANEGARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

OLEH

ADE MIFTAHUL JANNAH

10200120192

HTN-E

DOSEN:

KUSNADI UMAR M.H

HUKUM TATA NEGARA

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN AJARAN 2021/2022

PEMBAHASAN

Secara definisi, Hukum Tata Negara belum memiliki definisi secara universal. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai Hukum Tata Negara. Seperti Van Der Pot yg memberikan definisi bahwa “hukum tata negara merupakan peraturan yg dapat menentukan badan-badan yg dibutuhkan dan kewenangannya, beserta dengan hubungan individu warga negara di dalam kegiatan”. Sedangkan menurut Paul Scholten memberikan definisi tentang hukum tatanegara bahwa “hukum tata negara adalah hukum yg mengatur tata organisasi dalam sebuah negara”.

Menurut Christian Van Vollenhoven, pengertian hukum tata negara yakni “hukum yg mengatur semua masyarakat atasan atau bawahan dari tingkatannya, dan dari itu menentukan wilayah lingkungan masyarakat, badan-badan yg berkuasa, serta fungsi, susunan dan wewenang masing-masing masyarakat”. Dan menurut J.H.A. Logeman, yg hampir tidak berbeda jauh dengan definisi menurut Paul Scholten, bahwa “hukum tata negara adalah yg mengatur organisasi organisasi dalam negara”.

Setiap negara tentu mempunyai hukum hukumnya sendiri, tak terkecuali hukum tata negara. Setiap negara memiliki hukum tata negaranya sendiri namun dengan bahasa dan istilah yg berbeda. Seperti dalam bahasa inggris *constitutional law* yg artinya sama dengan bahasa indonesia yakni *hukum tata negara*, dalam bahasa jerman *verfassungsrecht*, dalam bahasa perancis *droit constitutional* dan dalam bahasa belanda *staatrecht*. Yg semuanya jika diartikan kedalam bahasa indonesia memiliki arti yg sama yaitu hukum tatanegara.

Hukum tata negara memiliki hubungan dengan beberapa ilmu lainnya yg jika diperhatikan memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Seperti pada Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara yg menjadikan negara sebagai objek kajian. Juga pada Ilmu Negara yg juga menjadikan negara sebagai objek kajiannya sama seperti Hukum Administrasi Negara. Dan pada Ilmu Politik yg mana baik Hukum Tatanegara dan Ilmu Politik, menjadikan negara sebagai objek penyelidikan. Barents, memberikan perumpaan bahwa jika Hukum Tata Negara adalah kerangkanya maka Ilmu Politik adalah daging yg ada disekitarnya.

Hukum Tata Negara memiliki ruang lingkup kajian yg mana mengenai organisasi-organisasi negara dan lembaga lembaga negara. Selain itu juga mencakup hak asasi manusia, bentuk dan sistem pemerintahan, kewenangan lembaga-lembaga negara, batasan dan pemisahan cabang kekuasaan, serta wilayah negara.

Sumber hukum merupakan aspek yg ditimbulkan oleh aturan-aturan yg kuat dan bersifat memaksa.

Sumber hukum tata negara adalah bentuk dan wujud dari peraturan hukum tentang ketatanegaraan.

Sumber Hukum Tata Negara secara umum terdapat dalam empat bentuk norma hukum yaitu:

1. Produk legislasi
2. Perjanjian yg mengikat
3. Putusan hakim
4. Keputusan administrasi yg berwenang

Sumber Hukum Tata Negara juga ada pada sumber hukum yg tidak tertulis.

Selain sumber hukum, ada juga dasar hukum yaitu norma hukum yg menjadi dasar untuk melakukan tindakan hukum tertentu yg dianggap sah dan sesuai dengan hukum.

Sedangkan Hukum Tata Negara di Indonesia terbagi menjadi hukum formil dan hukum materil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yg menentukan sumber hukum materil merupakan sumber hukum yg menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yg mengikat setiap orang.

Karena sumber hukum formil merupakan tempat dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, maka berkaitan dengan cara atau bentuk-bentuk peraturan tersebut berlaku. Sumber-sumber hukum formil meliputi:

1. Undang-Undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

1. Undang-Undang yakni peraturan negara yg memiliki kekuatan hukum yg mengikat, dan dilindungi negara.
2. Kebiasaan (konvensi) yakni tindakan, kelaziman dan peraturan yg tidak tertulis namun ditaati karena ada keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku hukum.
3. Yurisprudensi yaitu putusan hakim pada peradilan yg dapat dijadikan pedoman hukum berikutnya,
4. Traktat adalah kesepakatan atau perjanjian antar negara yg kemudian bisa menjadi sumber hukum. Dalam praktik dikenal dengan dua prosedur yaitu: pembentukan melalui tiga tahap: “perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi”. Pembentukan melalui dua tahap: “perundingan, dan penandatanganan”. Pembentukan melalui dua tahap jika dianggap tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yg cepat.
5. Doktrin ialah, pendapat ahli hukum yg ternama yg memiliki pengaruh dalam bidang hukum, serta keahlian dan integritasnya sudah diakui secara umum.

Asas hukum bisa dimaknai sebagai landasan untuk menjadi petunjuk lahirnya norma hukum. Norma hukum sendiri akan menjadi pedoman dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Sifat asas hukum dikembangkan oleh akal pikiran manusia, seperti asas keadilan yg mana asas keadilan tersebut adalah salah satu asas yg penting.

Asas hukum memiliki beberapa fungsi antara lain; menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penemuan hukum, menjaga ketaatan atau konsistensi agar dalam proses pembentukan maupun penerapannya tetap dalam ketentuan yg berlaku, sebagai kaidah kritis dalam aturan hukum, kaidah yg mempersatukan aturan-aturan, mengatasi benturan antar peraturan atau tindakan pemerintah dan koherensi aturan-aturan hukum.

Ada lima macam asas hukum tatanegara yaitu:

1. Asas pancasila
2. Asas negara hukum
3. Asas negara kesatuan
4. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi
5. Asas pemisahan kekuasaan

1. Asas pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam NKRI. Dengan memiliki lima butir nilai, yg mana semua aturan harus memngikutinya termasuk undang-undang. Seluruh penyelenggaraan negara tidak boleh dari nilai-nilai pancasila.
2. Asas negara hukum menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yg berlandaskan pada hukum. Yg bermakna bahwa negara memihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas kekuasaan pemerintah. Serta semua tindakan aparat negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum.
3. Asas negara kesatuan yg menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yg menjadikan segala kekuasaan tergabung dalam pusat pemerintahan, yg tindakan dan kebijakan dari elemen bangsa sesuai dengan prinsip persatuan tanpa memecah belah.
4. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi berarti prinsip negara yg mrnunjukkan kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan HAM.
5. Asas pemisahan kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan untuk mencegah pemimpin dari suatu lembaga atau kelompok mendapatkan kuasa yg terlalu banyak, sehingga adanya penyalahgunaan kuasa dapat diminimalisir.

Sejak era reformasi, kehidupan ketatanegaraa indonesia menjadi dinamis. Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yg

memungkinkan amandemen UUD 1945. Melalui kewenangan MKRI sebagai peradilan tata negara memberi lapangan bagi praktik yudisial di bidang Hukum Tata Negara. Sebelum berdirinya MKRI, Hukum Tata Negara tidak memiliki lahan praktik kecuali praktik nonyudisial di lingkungan lembaga politik. Sejarah ketatanegaraan Indonesia suda beberapa kali berubah seiring dengan digantinya UUD. Dimulai dari UUD 1945, kontitusi RIS, UUD sementara/UUD 1950, lalu kembali ke UUD 1945.

UUD 1945 dirancang sejak 29 mei 1945 sampai 16 juni 1945 oleh BPUPKI. Yg beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Ir. Soekarneo dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketua. Dengan dua tahap sidang. BPUPKI menyetujui hasil rancangan panitia kecil pada tanggal 16 agustus 1945, kemudian PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang pada 18 agustus 1945. Namun tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan hanya dijadikan alat untuk menguatkan status Indonesia sebagai sebuah negara.

Saat terjadi serangan agresi oleh belanda pada tahun 1947 dan 1948, Indonesia mengalami keadaan yg sulit dan terjepit sehingga PBB menginisiasi adanya perundingan konferensi meja bundar antara Indonesia dan belanda. Yg mana hasil dari konferensi meja bundar tersebut disetujui oleh kedua pihak dan disusunlah naskah UUD dengan nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian secara resmi diberlakukan pada tanggal 27 Desember 1949.

Karena terjadi demo besar besaran dari rakyat yg menginginkan Indonesia kembali menjadi NKRI, serta pengaruh negara RIS yg mulai berkurang dengan bergabungnya tiga negara bagian, yg akhirnya terjadi kesepakatan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI untuk melanjutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 17 agustus 1950 secara resmi telah diberlakukan Undang-Undang Sementara Tahun 1950. Dinamakan "Sementara" karena menunggu terpilihnya dewan konstituante yg akan menyusun kontitusi baru.

Pada 1959 presiden mengeluarkan Dekrit yg memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia, karena ketidakberhasilan konstituante dalam menjalankan tugasnya yg mendorong pemerintah untuk segera bertindak agar kekacauan politik dapat diatasi. Maka dengan diberlakukannya lagi UUD 1945, menjadi akhir dari UUDS 1950.

Semua hukum yg berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan UUD 1945. Namun sebagai dasar negara UUD 1945 ternyata memiliki beberapa kelemahan dan sudah empat kali mengalami amandemen. Amandemen, diartikan sebagai perubahan namun bukan pergantian. Setelah empat di amandemen, ada sebanyak 25 butir tidak dirubah, 46 butir dirubah atau di tambah dengan ketentuan lainnya.

Amandemen I, yg pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 oktober 1999 karena desakan kaum intelektual bersama rakyat dengan perubahan pada 9 pasal.

Amandemen II disahkan pada tanggal 18 agustus 2000 melalui sidang umum MPR, dengan perubahan pada 5 Bab dan 25 pasal.

Amandemen III disahkan pada tanggal 10 november 2001 melalui sidang tertutup MPR, dengan perubahan dari 3 Bab dan 22 pasal.

Amandemen ke-IV disahkan pada tanggal 10 agustus 2002, dengan perubahan terdiri dari 2 Bab dan 13 pasal.

Secara umum, konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik yg tertulis maupun yg tidak tertulis dan mengatur secara mengikat. Pendapat lain mengatakan bahwa konstitusi adalah dokumen yg di dalamnya berisi aturan-aturan. Konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tapi juga bisa berupa kesepakatan politik, negara, pengambilan keputusan, kekuasaan dan distribusi. Dalam ketatanegaraan RI, konstitusi bisa diartikan sebagai UUD, yg dimana UUD dianggap sebagai peraturan dasar.

Menurut Chairul Anwar, arti konstitusi adalah fundamental law tentang pemerintahan suatu negara beserta nilai-nilai fundamentalnya.

Dalam konstitusi terdapat tiga nilai, yakni; normatif, nominal, dan semantik. Normatif yg berarti konstitusi benar benar dijalankan secara utuh, diakui dan dipatuhi oleh pemerintah serta rakyat. Nominal yg berarti apabila konstitusi belum di jalankan dengan maksimal, dan belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan rakyat. Semantik yg berarti konstitusi tidak di jalankan sama sekali dan hanya menjadi alat pembenaran atas kebijakan penguasa.

Sebuah konstitusi juga memiliki sifat, antara lain:

1. Tertulis yg berarti konstitusi tersebut ditulis dalam bentuk buku atau serangkaian dokumen yg di gabungkan. Ini adalah konstitusi yg secara sadar dibingkai dan diberlakukan.
2. Tidak tertulis, dimana konstitusi tidak tertulis merupakan salah satu konstitusi yg tidak dirumuskan dan tidak disusun atau disahkan oleh Majelis Konstituante.
3. Fleksibel, yakni sifat konstitusi yg bisa dengan mudah diubah dan proses perubahannya mudah.
4. Kaku. Konstitusi yg bersifat kaku adalah yg tidak dapat dengan mudah diubah, dan metode amandemennya sulit.

Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yg berperan dalam negara yakni:

1. Sumber hukum tertinggi
2. Sebagai alat yg membatasi kekuasaan
3. Berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang
4. Pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara
5. Pengatur organ antar negara

Konstitusi juga memiliki tujuan yg berperan dalam suatu negara, yaitu:

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tak bertindak sewenang-wenang
2. Melindungi hak asasi manusia
3. Pedoman penyelenggaraan negara

Konstitusi yg bersifat fleksibel jika perlu dirubah, proses perubahannya cukup mudah. Sedangkan konstitusi yg bersifat kaku, proses perubahannya cukup rumit; harus melalui lembaga legislatif, rakyat secara langsung, utusan negara-negara bagian dan praktik kebiasaan ketatanegaraan.

Kekuasaan merupakan kewenangan yg dimiliki seseorang atau kelompok dalam suatu hal. Kemampuan individu untuk menguasai individu atau kelompok lain. Pembagian kekuasaan diperlukan untuk mencegah terjadinya kekkekuasaan absolut, agar tidak serta merta menjalankan kebijakan sendiri.

Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan meliputi:

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.
3. Federatif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri.

Sedangkan pendapat Montesquie, sedikit berbeda dengan John Locke. Montesquie tidak memasukkan kekuasaan federatif melainkan memasukkan kekuasaan yudikatif. Pendapat Montesquie yakni:

1. Legislatif, kekuasaan untuk membuat/membentuk UU
2. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan UU
3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan UU, dan mengadili setiap pelanggaran pada UU

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yg mengehendaki organ, fungsi dan personal lembaga negara, terpisah. Setiap lembaga negara masing-masing menjalankan secara mandiri tugas dan kewenangannya.

Lembaga negara yg menjalankan kekuasaan legislatif yakni MPR, DPR, dan DPD. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Serta kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh MK, MA dan perangkatnya.